

Nama : Rieke Nindita Sari

NPM : 2313031019

Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

Provinsi Nusantara Raya

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Apakah Struktur Belanja Sudah Efisien?

Secara normatif, alokasi 22% APBD untuk pendidikan telah melampaui mandat konstitusional Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan minimal 20%. Namun, efisiensi tidak cukup diukur dari besaran alokasi semata, melainkan dari kualitas output yang dihasilkan. Fakta bahwa skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional merupakan indikator kuat adanya *allocative inefficiency* dimana anggaran besar tidak menghasilkan luaran pendidikan yang proporsional.

Penyebab utamanya terletak pada dominasi belanja pegawai sebesar 68%, yang merupakan *rigid expenditure* (belanja kaku) yang sulit direduksi dalam jangka pendek namun tidak secara langsung meningkatkan kualitas pembelajaran jika distribusi guru tidak merata. Ini sejalan dengan temuan Hanushek (2011) yang menegaskan bahwa pengeluaran pendidikan per se tidak berkorelasi signifikan dengan hasil belajar siswa apabila tidak disertai akuntabilitas kualitas tenaga pengajar.

Bagian yang Perlu Direalokasi

Komponen	Porsi Saat Ini	Masalah	Rekomendasi
Gaji & Tunjangan	68%	Tidak efisien secara distribusi, kelebihan guru di kota	Pertahankan nominal, reformasi distribusi & skema insentif
Infrastruktur	12%	Digital sangat terbatas	Tingkatkan ke 18–20%, fokus pada digitalisasi
Bantuan Siswa	8%	Terlalu kecil untuk mengatasi ketimpangan	Tingkatkan ke 14–15%, berbasis <i>means-testing</i>
Administrasi	12%	Terlalu besar, potensi inefisiensi birokrasi	Pangkas ke 6–8% melalui otomasi sistem

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Ketergantungan pada Pemerintah Daerah

Struktur pembiayaan Nusantara Raya terlalu monolitik dan dependen pada sumber tunggal APBD. Ketergantungan ini menciptakan dua kerentanan struktural: pertama, volatilitas fiskal daerah akibat fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD); kedua, hilangnya diversifikasi risiko pembiayaan yang dapat mengakibatkan stagnasi program saat tekanan anggaran meningkat.

Teori Human Capital (Becker, 1964) menegaskan bahwa investasi pendidikan menghasilkan eksternalitas positif yang melampaui kapasitas pembiayaan pemerintah seorang diri, sehingga secara teoritis justifikasi keterlibatan sektor non-pemerintah sangat kuat.

Model Pembiayaan Alternatif yang Tepat

a. Kemitraan Publik-Swasta (KPS/PPP) dalam Infrastruktur Digital

Model *Build-Operate-Transfer* (BOT) dapat diterapkan untuk pembangunan infrastruktur teknologi pendidikan. Perusahaan telekomunikasi dan teknologi dapat berinvestasi membangun jaringan dan perangkat sekolah, dengan pemerintah memberikan insentif pajak dan jaminan penggunaan layanan dalam jangka panjang.

b. Education Endowment Fund

Pemerintah provinsi membentuk dana abadi pendidikan (*endowment fund*) dengan modal awal dari APBD, diperkuat oleh kontribusi BUMN, perusahaan daerah, dan dana CSR. Hasil investasi dana ini dialokasikan untuk beasiswa dan program peningkatan guru, model ini dijalankan sukses oleh Education Endowment Foundation di Inggris.

c. Obligasi Daerah Pendidikan (*Education Bond*)

Menerbitkan obligasi daerah bertujuan khusus (*green/social bond*) untuk membiayai proyek infrastruktur pendidikan jangka panjang, dengan pengembalian berbasis peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah di masa depan.

d. Skema *Income-Contingent Loan* untuk Pendidikan Vokasi

Khusus untuk segmen pendidikan kejuruan dan pelatihan, skema pinjaman yang cicilan pengembaliannya dikaitkan dengan pendapatan lulusan dapat mengurangi beban APBD sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap *employability* lulusannya.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Elemen yang Realistis Diadopsi

a. Performance-Based Budgeting (PBB)

Prioritas Tinggi negara OECD seperti Finlandia dan Korea Selatan mengalokasikan anggaran berdasarkan capaian indikator kinerja (hasil ujian, angka putus sekolah, rasio guru-siswa efektif). Elemen ini realistis diadopsi karena Indonesia telah memiliki infrastruktur hukum melalui PP No. 17/2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Yang diperlukan adalah penguatan sistem data dan kapasitas evaluasi di tingkat daerah.

b. Needs-Based Funding Formula

Kanada dan Belanda menerapkan formula pembiayaan berbasis kebutuhan siswa sekolah di daerah terpencil, sekolah dengan siswa berkebutuhan khusus, dan sekolah dengan proporsi siswa miskin tinggi mendapat alokasi lebih besar. Ini kompatibel dengan semangat afirmasi dalam sistem pendidikan Indonesia dan dapat langsung diterapkan melalui revisi formula Dana BOS.

c. Sistem Evaluasi Berbasis Data

Penggunaan *learning management system* dan dashboard analitik untuk memonitor capaian siswa secara *real-time* (seperti diterapkan di Estonia) merupakan elemen yang semakin terjangkau secara teknologi dan sangat relevan untuk konteks Nusantara Raya yang menghadapi ketimpangan kota-desa.

Tantangan Implementasi di Konteks Indonesia

Elemen OECD	Tantangan Spesifik di Indonesia
PBB	Kapasitas SDM perencana daerah rendah; budaya <i>input-based budgeting</i> yang mengakar
Needs-based funding	Data kependudukan dan kemiskinan multidimensi belum terintegrasi di tingkat sekolah
Kualitas guru sistemik	Regulasi kepegawaian (ASN) membatasi fleksibilitas mutasi dan penghargaan berbasis kinerja
Evaluasi berbasis data	Kesenjangan infrastruktur digital justru menjadi prasyarat yang belum terpenuhi

4. Proposal Reformasi 5 Tahun (2025–2030)

Kerangka Strategis: "NUSANTARA CERDAS"

VISI : Sistem Pendidikan Berkualitas, Merata, dan Akuntabel

Tahun 1-2 : Fondasi & Konsolidasi

Tahun 3-4 : Implementasi & Skalasi

Tahun 5 : Evaluasi & Pelembagaan

A. Reformasi Struktur Belanja

Fase 1 (Tahun 1–2): Audit dan Pemetaan

- Lakukan *expenditure review* komprehensif oleh tim independen untuk mengidentifikasi kebocoran dan inefisiensi pada pos administrasi (target: pangkas dari 12% ke 8%)
- Terapkan sistem e-budgeting terintegrasi untuk seluruh satuan pendidikan guna mengurangi *rent-seeking* dalam proses pengadaan

Fase 2 (Tahun 3–4): Realokasi Bertahap

- Hasil penghematan administrasi dialihkan ke dana beasiswa berbasis *means-testing* dan *merit* (target alokasi: 14%)
- Infrastruktur digital ditingkatkan ke 18% dengan mekanisme KPS

Target Struktur Belanja Akhir (Tahun 5):

Komponen	Awal	Target Akhir
Gaji & Tunjangan	68%	58%
Infrastruktur & Digital	12%	20%
Bantuan Siswa	8%	14%
Administrasi	12%	8%

B. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

1. Redistribusi Berbasis Insentif (Tahun 1–2)

Masalah maldistribusi guru tidak dapat diselesaikan melalui paksaan regulatif semata. Diperlukan skema insentif finansial dan non-finansial: tunjangan khusus daerah terpencil yang kompetitif (diusulkan 40–60% di atas tunjangan standar), kemudahan promosi jabatan, dan program perumahan dinas layak.

Model ini mengacu pada keberhasilan program *Teach for Remote Areas* di Thailand.

2. Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (Tahun 2–4)

- Wajibkan 40 jam pelatihan profesional per tahun per guru, dengan modul yang dikembangkan bersama universitas lokal
- Terapkan *peer coaching* berbasis komunitas belajar guru (*Professional Learning Community/PLC*) di level kecamatan
- Kembangkan sistem sertifikasi ulang (*re-certification*) setiap 5 tahun untuk memastikan relevansi kompetensi

3. Reformasi Skema Tunjangan Berbasis Kinerja (Tahun 3–5)

Secara bertahap, hubungkan sebagian tunjangan kinerja (diusulkan 15–20% dari total tunjangan) dengan indikator terukur: hasil belajar siswa, kehadiran, dan partisipasi dalam program pengembangan. Ini memerlukan negosiasi dengan organisasi profesi guru dan harmonisasi dengan regulasi ASN.

C. Digitalisasi Sekolah

Tahapan implementasi:

Tahun 1: Pemetaan infrastruktur digital seluruh sekolah

Kategorisasi: Zona Merah (0 akses), Kuning (parsial), Hijau (memadai)

Tahun 2: Intervensi Zona Merah (sekolah terpencil)

Program "Sekolah Terkoneksi" via KPS dengan provider telekomunikasi

Distribusi perangkat keras prioritas (tablet/laptop per 3 siswa)

Tahun 3: Pengembangan Konten Digital Lokal

Kemitraan dengan platform edtech nasional

Pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran

Tahun 4: Integrasi Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS)

Dashboard real-time capaian siswa per sekolah

Data terhubung ke sistem perencanaan anggaran daerah

Tahun 5: Evaluasi dan Standardisasi

Audit dampak digitalisasi terhadap hasil belajar

Replikasi model yang berhasil

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

1. Arsitektur Sistem M&E

Reformasi tanpa sistem monitoring yang kuat hanya akan menjadi dokumen kebijakan tanpa implementasi. Diusulkan tiga lapis monitoring:

Lapis Makro: Evaluasi tahunan oleh Dewan Pendidikan Provinsi dengan indikator utama: skor PISA-like assessment daerah, angka partisipasi murni, dan indeks ketimpangan kualitas kota-desa

Lapis Meso: Monitoring semesteran di tingkat kabupaten/kota menggunakan dashboard digital terintegrasi

Lapis Mikro: Monitoring bulanan di tingkat sekolah oleh pengawas sekolah yang kapasitasnya telah diperkuat

2. Indikator Kinerja Utama (KPI)

Dimensi	Indikator	Target Tahun 5
Kualitas Pembelajaran	Skor literasi-numerasi	Di atas rata-rata nasional
Pemerataan	Indeks Gini kualitas sekolah	Turun 30% dari baseline
Efisiensi Belanja	Rasio output/input anggaran	Meningkat 25%
Digitalisasi	% sekolah terkoneksi internet	95%
Kualitas Guru	% guru tersertifikasi aktif	90%

3. Mekanisme Akuntabilitas Publik

Publikasi *Education Budget Transparency Report* tahunan yang dapat diakses public. Forum konsultasi publik semesteran melibatkan orang tua, komunitas, dan sektor swasta. Audit kinerja independen oleh BPK dengan fokus pada *value for money*, bukan sekadar kepatuhan administratif